

**RENCANA A
TAHUN ANGGAR
BADAN PENGELOLAAN KEI**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
			TW I	TW II	TW III	TW III		
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik (Good Governance)	Terselenggaranya Pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
A							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1			25	25	25	25	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2				50	50		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3			100				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4			25	25	25	25	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
B							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan daerah yang tepat waktu
5			40	20	30	10	Penyediaan administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN.
							Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
6				50	50		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data Pendapatan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
c							Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN/Non ASN yang dilakukan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
7			50	50			Pendataan dan Pengolahan Administasi Kepegawaian	Jumlah ASN/Non ASN yang dilakukan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

8			25	25	25	25	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
9				25	25	50	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
D							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dilaksanakan Secara Akuntabel
10			25	25	25	25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11			25	25	25	25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan
12			20	30	20	30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
2							PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
H							Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
13				50	50		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun
14				65	35		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun.
15					50	50	Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi
16				25	75		Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD yang di Verifikasi
17				10	20	70	koordinasi, Penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang Diverifikasi
18				10	30	60	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang Diverifikasi
19					60	40	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
20				10	65	25	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Kepala Daerah

21			30	10	30	30	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen Regulasi serta kebijakan bidang Anggaran
22			10	10	60	20	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen hasil perencanaan pendapatan
23			20	50	20	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen hasil koordinasi Perencanaan anggaran belanja daerah
24			50	10	20	20	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penggaran daerah pemerintah kabupaten/kota
I							Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
25			100				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Kas Umum Daerah
26			100				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
27			100				Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kerjasama dan Pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bukan BANK
28			100				Koordinasi dan Penyusunan Laporan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah, Laporan Aliran kas ,dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran perhitungan pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan hasil Realisasi penerimaan dan pengeluaran kas dan Penyetoran Perhitungan fihak ketiga (PFK) dan laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan laporan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran kas daerah , laporan aliran kas dan pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
29			100				Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran Kas serta pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait
30			100				Pembinaan Penatausahaan keuangan Pemerintah kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penata Usahaan keuangan Pemerintah Daerah

J							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
31			25	25	25	25	Rekonsiliasi dan Verifikasi aset, Kewajiban , ekuitas, Pendapatan, belanja, Biaya, pendapatan-LO dan beban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi aset, Kewajiban , ekuitas, Pendapatan, belanja, Biaya, pendapatan-LO dan beban
32			25	25	25	25	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran	Jumlah Laporan Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan semesteran OPD yang tepat waktu
33			25	25	25	25	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan OPD dan BLUD yang Akuntabel
34			50	40	10		Koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
35			50	50			Penyusunan Analisis laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah analisis laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel
K							Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
36				50		50	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan	Jumlah Dokumen hasil Inventarisir dan analisa data Bidang Keuangan daerah
37			50	50			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
38			30	40	20	10	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

3		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan BMD					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
L							Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
39			20	40	40	20	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
40			25	25	25	25	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD
41`			10	40	40	10	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah
42			15	35	35	15	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan barang milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
43			25	25	25	25	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan BMD pada SKPD
44			25	25	25	25	Penyusunan Laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik daerah yang disusun.
45				50	50		Pembinaan Pengelolaan barang milik daerah Pemerintah kabupaten /kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan pengelolaan aset/barang Opd mengikuti diklat teknis
4		Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
M							Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
46			25	25	25	25	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencana Pengelolaan Pajak Daerah
47			25	25	25	25	Analisa dan pengembangan Pajak daerah Serta Penyusunan Kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Analisis pengembangan Pajak Daerah
48				50	25	25	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah

49			25	25	25	25	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan hasil pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan basis data dan pajak daerah
50			30	30	30	10	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Jumlah Pemungutan Objek Pajak PBB P2
51			25	25	25	25	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Wajib Pajak Daerah
52				50	25	25	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah laporan permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan yang belum ditindaklanjuti dokumen pelayanan dan konsultasi pajak daerah
53			25	25	25	25	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak daerah	Jumlah Dokumen yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah
54				25	50	25	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen tertagihan WP yang memiliki Piutang Pajak
55			25	25	25	25	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan
56			25	25	25	25	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

CATATAN :

Tanda bewarna  *Merupakan waktu pelaksanaan*

**AKSI
TAN 2024
KAWAN DAERAH**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

12 Laporan	299,749,000												
2 Objek Pajak	398,750,000												
200 Dokumen	199,912,000												
3 Laporan	199,931,000												
1 Dokumen	384,198,000												
2 Dokumen	399,959,000												
17 Dokumen	599,072,000												
2 Laporan	596,468,000												

Malinau, 31 Januari 2024
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Malinau,

Martha Daring, SE.,M.Si
Pembina TK.1 / IV b
Nip. 19801209 200604 2 019

RENCANA A
TAHUN ANGGAR.
BADAN PENGELOLAAN KEI

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR
			TW I	TW II	TW III	TW III		
I	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik (Good Governance)	Terselenggaranya Pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
A							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1			40	20	30	10	Penyediaan administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN.
B							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dilaksanakan Secara Akuntabel
2			20	30	20	30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
II							PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
C							Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
3				50	50		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun
4				65	35		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun.
5					50	50	Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi
6				25	75		Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD yang di Verifikasi
7				10	20	70	koordinasi, Penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang Diverifikasi
8				10	30	60	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang Diverifikasi
9					60	40	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD

10				10	65	25	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Kepala Daerah
11			30	10	30	30	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen Regulasi serta kebijakan bidang Anggaran
12			10	10	60	20	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen hasil perencanaan pendapatan
13			20	50	20	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen hasil koordinasi Perencanaan anggaran belanja daerah
14			50	10	20	20	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penggaran daerah pemerintah kabupaten/kota
D							Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
15			50	50			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
16			30	40	20	10	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

KSI
AN 2024
JANGAN DAERAH

[illegible]

2 Dokumen	1,999,809,000												
7 Dokumen	1,499,996,000												
1 Dokumen	399,996,000												
2 Dokumen	499,968,000												
56 Orang	849,394,000												
	799,937,000												
2 Dokumen	199,994,000												
8 Orang	599,943,000												

Malinau, 31 Januari 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Malinau,

Martha Daring. SE..M.Si
Pembina TK.1 / IVb
Nip. 19801209 200604 2 019

**RENCANA A
TAHUN ANGGAR
BADAN PENGELOLAAN KEI**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
			TW I	TW II	TW III	TW III		
I	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik (Good Governance)	Terselenggaranya Pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
A							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
1			25	25	25	25	Rekonsiliasi dan Verifikasi aset, Kewajiban , ekuitas, Pendapatan, belanja, Biaya, pendapatan-LO dan beban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi aset, Kewajiban , ekuitas, Pendapatan, belanja, Biaya, pendapatan-LO dan beban
2			25	25	25	25	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran	Jumlah Laporan Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan semesteran OPD yang tepat waktu
3			25	25	25	25	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan OPD dan BLUD yang Akuntabel
4			50	40	10		Koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5			50	50			Penyusunan Analisis laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah analisis laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel

AKSI
AN 2024
UANGAN DAERAH

TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	JADWAL KEGIATAN											
		TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100%	2,499,906,500												
	2,499,906,500												
1 Dokumen	399,996,000												
12 Laporan	499,982,000												
1 Laporan	399,938,000												
2 Dokumen	1,000,000,000												
1 Laporan	199,990,500												

Malinau, 31 Januari 2024
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Malinau,

Martha Daring, SE., M.Si

Pembina TK.1 / IVb

Nip. 19801209 200604 2 019

**RENCANA AN
TAHUN ANGGARA
BADAN PENGELOLAAN KEU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR
			TW I	TW II	TW III	TW III		
I		Terselenggaranya Pemerintahan yang baik dan bebas dari					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
A							Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
1			100				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Kas Umum Daerah
2			100				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
3			100				Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kerjasama dan Pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bukan BANK
4			100				Koordinasi dan Penyusunan Laporan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah, Laporan Aliran kas ,dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran perhitungan pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan hasil Realisasi penerimaan dan pengeluaran kas dan Penyetoran Perhitungan pihak ketiga (PFK) dan laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan laporan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran kas daerah , laporan aliran kas dan pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PEK)
5			100				Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran Kas serta pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait
6			100				Pembinaan Penatausahaan keuangan Pemerintah kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penata Usahaan keuangan Pemerintah Daerah

SI
IN 2024
ANGAN DAERAH

TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	JADWAL KEGIATAN											
		TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2,147,288,000												
	2,147,288,000												
4 Dokumen	599,996,000												
56 Dokumen	299,957,000												
12 Dokumen	199,953,000												
12 Laporan	359,986,000												
56 Dokumen	299,928,000												
56 Orang	387,468,000												

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Malinau,

Martha Daring, SE.,M.Si
Pembina TK.1 / Ivb
Nip. 19801209 200604 2 019

**RENCANA A
TAHUN ANGGAR
BADAN PENGELOLAAN KEI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
			TW I	TW II	TW III	TW III		
I		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan BMD					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
A							Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
1			20	40	40	20	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
2			25	25	25	25	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD
3			10	40	40	10	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah
4			15	35	35	15	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan barang milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
5			25	25	25	25	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan BMD pada SKPD
6			25	25	25	25	Penyusunan Laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik daerah yang disusun.
7				50	50		Pembinaan Pengelolaan barang milik daerah Pemerintah kabupaten /kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan pengelolaan aset/barang Opd mengikuti diklat teknis

AKSI
AN 2024
UANGAN DAERAH

TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	JADWAL KEGIATAN											
		TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4,502,230,000												
	4,502,230,000												
200 Dokumen	199,988,100												
56 Laporan	499,989,500												
1 Laporan	2,572,318,700												
4 Dokumen	399,985,500												
56 Laporan	299,991,000												
2 Laporan	329,990,200												
56 Orang	199,967,000												

Malinau, 31 Januari 2024
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Malinau,

Martha Daring, SE.,M.Si

Pembina TK.1 / Ivb

Nip. 19801209 200604 2 019

**RENCANA A
TAHUN ANGGAR
BADAN PENGELOLAAN KE**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
			TW I	TW II	TW III	TW III		
I		Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
A							Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
1			25	25	25	25	Analisa dan pengembangan Pajak daerah Serta Penyusunan Kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Analisis pengembangan Pajak Daerah
2				50	25	25	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah
3			25	25	25	25	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan hasil pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan basis data dan pajak daerah
4			25	25	25	25	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Wajib Pajak Daerah
5			25	25	25	25	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak daerah	Jumlah Dokumen yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah
6			25	25	25	25	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan
7			25	25	25	25	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

AKSI
IAN 2024
UANGAN DAERAH

TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	JADWAL KEGIATAN											
		TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5,151,707,200												
	5,151,707,200												
10 Dokumen	499,989,500												
17 Laporan	2,572,318,700												
12 Laporan	299,749,000												
200 Dokumen	199,912,000												
1 Dokumen	384,198,000												
17 Dokumen	599,072,000												
2 Laporan	596,468,000												

Malinau, 31 Januari 2024
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Malinau,

Martha Daring, SE., M.Si

Pembina TK.1 / Ivb

Nip. 19801209 200604 2 019

**RENCANA
TAHUN ANGGA
BADAN PENGELOLAAN K**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
			TW I	TW II	TW III	TW III		
I	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik (Good Governance)	Terselenggaranya Pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
A							Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
1				50	50		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data Pendapatan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
II		Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
B							Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
2			25	25	25	25	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencana Pengelolaan Pajak Daerah
3			30	30	30	10	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Jumlah Pemungutan Objek Pajak PBB P2
4				50	25	25	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah laporan permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan yang belum ditindaklanjuti dokumen pelayanan dan konsultasi pajak daerah
5				25	50	25	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen tertagihan WP yang memiliki Piutang Pajak

AKSI
RAN 2024
EUANGAN DAERAH

TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	JADWAL KEGIATAN											
		TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100%	49,999,500												
	49,999,500												
6 Dokumen	49,999,500												
	1,198,628,100												
	1,198,628,100												
2 Dokumen	199,988,100												
2 Objek Pajak	398,750,000												
3 Laporan	199,931,000												
2 Dokumen	399,959,000												

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Malinau,

Martha Daring, SE.,M.Si
Pembina TK.1 / IVb
Nip. 19801209 200604 2 019

**RENCANA
TAHUN ANGGA
BADAN PENGELOLAAN KI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
			TW I	TW II	TW III	TW III		
I	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik (Good Governance)	Terselenggaranya Pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
A							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1			25	25	25	25	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2				50	50		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3			100				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4			25	25	25	25	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
B							Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN/Non ASN yang dilakukan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
5			50	50			Pendataan dan Pengolahan Administasi Kepegawaian	Jumlah ASN/Non ASN yang dilakukan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
6			25	25	25	25	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

7				25	25	50	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
C							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dilaksanakan Secara Akuntabel
8			25	25	25	25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9			25	25	25	25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan
II							PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
D							Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
10				50		50	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan	Jumlah Dokumen hasil Infentarisir dan analisa data Bidang Keuangan daerah

**AKSI
RAN 2024
EUANGAN DAERAH**

[illegible]

1 Laporan	400,000,000												
	899,999,000												
35 Jenis	600,000,000												
4 Paket	299,999,000												
	99,996,000												
	99,996,000												
1 Dokumen	99,996,000												

Malinau, 31 Januari 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Malinau,

Martha Daring, SE., M.Si
Pembina TK.1 / IVb
Nip. 19801209 200604 2 019

